

# FORMAT PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI

Mujibur Rohman

Intitut Agama Islam Negeri Purwokerto

**Abstract:** The concept of education that needs to be updated is to change the view of the dichotomy of science in Islam by harmonizing the verses of illahiyah with kauniyah verse, God - human relationship in the form of education - antropo theo - centric, harmonize faith with science, as well as harmonize the fulfillment of spiritual and physical needs.

**Keywords:** Islamic education, globalization.

**Abstrak:** Konsep pendidikan yang perlu diupdate adalah mengubah pandangan dikotomi sains dalam Islam dengan menyelaraskan ayat-ayat illahiyah dengan syair kauniyah, hubungan Tuhan - manusia dalam bentuk pendidikan - antropo theo - centric, menyelaraskan iman dengan sains, sekaligus menyelaraskan pemenuhan kebutuhan spiritual dan jasmani.

**Kata kunci:** pendidikan islami, globalisasi

## A. PENDAHULUAN

Dalam konteks pendidikan Islam, globalisasi dapat sebagai peluang sekaligus tantangan, dan ancaman. Sebagai peluang, satu sisi akan memudahkan pendidikan Islam untuk mengakses berbagai informasi dengan mudah. Juga memudahkan pendidikan Islam untuk menyebarluaskan produk-produk keilmuan yang memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. sebagai ancaman, ternyata globalisasi tidak hanya mempengaruhi tatanan kehidupan pada tataran makro, namun juga mengubah tata kehidupan mikro, misalnya terhadap ikatan-ikatan kehidupan sosial masyarakat, hilangnya nilai-nilai tradisi, lunturnya adat-istiadat, sopan santun, dan penyimpangan sosial dalam berbagai modus operandinya (Nunu Ahmad, 2010: xi)

Globalisasi, langsung atau tidak langsung, dapat membawa paradoks bagi praktik pendidikan Islam, seperti terjadinya kontra-moralitas antara apa yang di idealkan dalam pendidikan Islam (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*), maka gerakan *tajdid* dalam pendidikan Islam hendaknya melihat

kenyataan kehidupan masyarakat terlebih dahulu, sehingga ajaran Islam yang hendak dididikan dapat *landing*, dan sesuai dengan kondisi masyarakat (Imam Machali, 2004: 11).

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pendidikan (termasuk pendidikan Islam) akan mempersiapkan *output-nya* dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus melaju sehingga mereka bisa menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dapat mewarnai serta bisa terakomodasi dalam semua sektor masyarakat tersebut. Lebih jauh dari itu, pendidikan (*output-nya, baca*) bisa menjadi agen perubahan (Abdurrahman, 2001: 301) Oleh karena itu, mau tidak mau pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan zaman. Tuntutan pembaharuan pendidikan menjadi suatu keharusan dan "pembaharuan" pendidikan selalu mengikuti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik pada konsep, kurikulum, proses, fungsi, tujuan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan sumber daya pengelola pendidikan (Hujair, 2003: 5)

Pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Selama ini, upaya pembaharuan pendidikan Islam secara mendasar, selalu dihambat oleh berbagai masalah mulai dari persoalan dana sampai tenaga ahli. Padahal pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas. Berdasarkan uraian ini, ada dua alasan pokok mengapa konsep pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat madani sangat mendesak. [a] Konsep dan praktik pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit, artinya terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani. [b] Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan masyarakat dan bangsa Indonesia di segala bidang. Maka, untuk menghadapi dan menuju masyarakat globalisasi diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam, upaya memformat ulang teori dan praktik pendidikan Islam, tidak bisa tidak, mestilah segera dilakukan, yaitu dengan pembenahan wawasan dan pola pikir: berbuat secara lokal, berpikir secara global.

## B. PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik yang bisa menghasilkan manusia berbudaya tinggi, maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha kependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhannya (HM. Arifin, 2003: 7).

Tujuan dan sasaran pendidikan berbeda-beda menurut pandangan hidup masing-masing pendidik atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu perlu dirumuskan pandangan hidup Islam yang mengarahkan tujuan dan sasaran pendidikan Islam.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dapat dikemukakan kata-kata atau istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan, yaitu *rabba*, *allama*, dan *addaba*.

Dari sudut *etimologi*, pengertian pendidikan Islam diwakili oleh istilah taklim dan Tarbiyah yang berasal dari kata dasar *allama* dan *rabba* sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an, sekalipun konotasi kata Tarbiyah lebih luas karena mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mendidik, serta sekaligus mengandung makna mengajar (*allama*) (Jusuf, 1995: 94).

Muhammad Naquib Al-Attas dalam bukunya, *Konsep Pendidikan Islam*, dengan gigih mempertahankan penggunaan istilah *ta'dib* untuk konsep pendidikan Islam, bukan Tarbiyah, dengan alasan bahwa istilah *ta'dib*, mencakup wawasan ilmu dan amal yang merupakan esensi pendidikan Islam (Achmadi, 2005: 26). Lebih lanjut Naquib berpendapat bahwa mendidik adalah membentuk manusia untuk menempati tempatnya yang tepat dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara proporsional sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang dikuasainya (Jusuf, 1995: 94).

Mendidik juga berkonotasi dengan pengertian bahwa pendidik harus mampu menyampaikan setiap ilmu atau hubungan ilmu dengan ilmu lain dalam satu susunan yang sistemik dan harus disampaikan sesuai dengan susunan kemampuan dasar (*kompetensi*) yang dimiliki peserta didik. Melalui teknologi dan keterampilan tertentu, ilmu itu diaplikasikan dalam suatu keteraturan perangkat sistem sehingga memungkinkan untuk menjadi alat yang ampuh bagi kehidupan manusia dalam membentuk dan mengembangkan masyarakatnya dan budayanya dalam suatu komunitas yang terus menerus berproses menuju tingkat kesempurnaan tertentu (Jusuf, 1995: 95)

Selain itu, Ahmad D. Marimba mengartikan pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Yang dimaksud Kepribadian Utama adalah Kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang mempunyai nilai-nilai agama Islam (Priatna, 2004: 285). Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany mengartikan pendidikan Islam sebagai perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu maupun pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar; atau pengajaran sebagai aktivitas asasi, dan sebagai proporsi di antara profesi-profesi dalam masyarakat. Pendidikan Islam memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Disamping itu, pendidikan tersebut juga menekankan aspek produktifitas dan kreatifitas manusia dalam berperan serta berprofesi kehidupan bermasyarakat (Priatna, 2004: 285).

Berbeda dengan Zaqawi Soejati (1986) yang memberikan pengertian pendidikan Islam yang lebih terperinci. *Pertama*, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya di dorong oleh hasrat dan semangat cita-cita mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan (Malik, 2005: 241).

*Kedua*, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu yang diperlakukan sebagaimana ilmu yang lain.

*Ketiga*, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian tersebut di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus bidang studi yang ditawarkan lewat program studi yang diselenggarakan (Malik, 2005: 242).

Menurut Maksum Mochtar (1999) mengatakan bahwa secara garis besar, pendidikan Islam di Indonesia muncul dalam empat bentuk yang menonjol. *Pertama*, pendidikan Islam diakui sebagai mata pelajaran wajib dalam setiap jenjang pendidikan persekolahan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. *Kedua*, pendidikan Islam menjelma sebagai ciri yang memberi warna pendidikan sekolah tertentu. Dalam kaitan ini, pendidikan Islam dikembangkan menjadi muatan-muatan kurikulum lokal sekolah milik yayasan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Seperti *MU, NU, PUI, Al-Azhar, Al-Irsyad*, dan lain-lain. *Ketiga*, pendidikan Islam menjadi bidang kajian khusus untuk mendidik tenaga-tenaga ahli dalam bidang keislaman, seperti SMU/MA khusus keagamaan. *Keempat*, pendidikan Islam berkembang dalam bentuk lembaga

pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan majelis taklim (Mochtar, 1999: 191-192). Dengan demikian, secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia berkembang di sekolah, madrasah, dan pesantren.

Dari beberapa batasan-batasan dan pengertian pendidikan Islam diatas, secara implisit dapat dipahami, bahwa pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang berusaha membentuk aspek jasmani dan rohani manusia berdasarkan pada nilai-nilai agama Islam untuk mencapai kepribadian muslim yang mempunyai kompetensi dalam agama dan sains, agar dapat menempatkan dirinya secara tepat dalam masyarakat dan dapat bersikap, serta mengelola perubahan sosial dan teknologi untuk kemajuan pendidikan Islam.

### C. LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan dari masa ke masa dipelajari dengan cara mengetahui lembaga-lembaga pengajaran, sistemnya, kurikulum, metode, serta tujuannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Asma Hasan Fahmi sebagai berikut:

*“ lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah merupakan hasil pikiran setempat yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan suatu masyarakat Islam dan berpedoman kepada ajaran-ajarannya dan tujuan-tujuannya ”.*

Secara keseluruhan lembaga pendidikan Islam bukan suatu yang datang dari luar atau diambil dari kebudayaan-kebudayaan lama, tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai hubungan erat kehidupan Islam secara umum.

Sebagaimana Pada zaman Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat Makkah dan Madinah, belum muncul lembaga pendidikan semacam madrasah sebagaimana yang dikembangkan oleh Nizam al-Mulk, perdana menteri pada masa dinasti Saljuk (1065-1067), tapi pendidikan Islam secara institusional telah berproses secara mapan.

Lembaga pendidikan Islam sebelum madrasah di masa klasik diklasifikasikan atas dasar muatan kurikulum yang diajarkan. Dalam hal ini, kurikulumnya meliputi pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Atas dasar ini, lembaga pendidikan Islam di masa klasik menurut Charles Michael Stanton digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu lembaga pendidikan formal dan non formal, di mana yang pertama mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan yang kedua mengajarkan pengetahuan umum, termasuk filsafat.

George Maksidi dalam hal yang sama menyebutnya sebagai lembaga pendidikan eksklusif (tertutup) dan lembaga pendidikan inklusif (terbuka). menawarkan pengetahuan umum.

Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada sebelum kebangkitan madrasah pada masa klasik adalah, Kuttab/Maktab, Masjid, Shuffah, Halaqah, Khan, Ribath, Rumah-rumah Ulama, Rumah sakit, dan Badi'ah (Abuddin Nata, 2010: 32-34).

Pendidikan Islam muncul dan berkembang di Nusantara sejak Islam masuk ke kepulauan ini, dibawa para sufi pengembara atau pedagang dari Timur Tengah yang kemudian hidup membaaur dengan penduduk lokal. Ketika membaaur itulah berlangsung transmisi yang diterima penduduk lokal melalui proses penyesuaian dengan tata cara hidup dan tradisi yang telah mereka jalani sebelumnya.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia diawali dari bentuk paling sederhana. Melalui kegiatan mengaji Al-Qur'an dan tata cara beribadah di surau-surau, dan langgar, yang kemudian sepanjang sejarah mengalami perubahan (Mahmud Yunus, 1957: 34-35). Mulai dari perubahan kelembagaan, kurikulum dan materi, modifikasi metode, guru dan para pendidik. Perubahan tersebut tidak lain merupakan hasil pergumulan dari *stakeholder* pendidikan Islam. Salah satu faktor eksternal yang ikut mendorong terjadinya perubahan keberlangsungan pendidikan Islam di Indonesia adalah kebijakan negara yang menjadi landasan pengaturan sistem integral dari sistem pendidikan nasional.

Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang mempunyai kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sejak berdirinya nusantara telah memberikan pencerahan dan pencerdasan dalam mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas dan islami, terutama di bidang keagamaan. Munculnya kader-kader ulama merupakan kombinasi yang sempurna dari pendidikan madrasah dan pesantren, sehingga para ahli agama tumbuh subur di Nusantara (Nunu Ahmad dkk, 2010: i).

Perkembangan madrasah sejak Indonesia merdeka hingga sekarang menunjukkan adanya proses dinamika, adaptasi danantisipasi, respon yang tinggi terhadap kemajuan zaman. Jika pada masa-masa awal, madrasah terkesan sangat eksklusif dan cenderung terasing, maka pada masa-masa selanjutnya terjadi perkembangan yang sangat pesat. Bahkan, dalam perkembangan terakhir, madrasah sudah beranjak dari paradigma lama sebagai pendidikan Islam murni. Madrasah sekarang tampil seperti sekolah. Madrasah mengembangkan kurikulum yang memberikan porsi yang sangat besar untuk mata pelajaran umum. Madrasah ditata ulang, baik penjenjangan maupun jenisnya. Penjenjangan pendidikan madrasah diatur sejalan dengan sistem penjenjangan pendidikan secara nasional. *Pertama*, madrasah-madrasah mengembangkan kurikulum yang memberikan porsi cukup besar untuk mata pelajaran non-

keagamaan. *Kedua*, sebagian madrasah menggunakan kurikulum yang berorientasi kepada mata pelajaran keagamaan. *Ketiga*, banyak madrasah yang memanfaatkan porsi kurikulum muatan lokal untuk mengintegrasikan ciri-ciri keagamaan, kejujuran, atau orientasi keilmuan tertentu. *Keempat*, murid-murid tamatan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah dan perguruan tinggi (Nunu Ahmad dkk, 2010: viii)

#### D. GLOBALISASI

Istilah globalisasi diambil dari kata "*global*". Kata ini melibatkan kesadaran baru bahwa dunia adalah sebuah kontinuitas lingkungan yang terkonstruksi sebagai kesatuan utuh. Marshall McLuhans menyebutkan dunia yang diliputi kesadaran globalisasi ini *global village* (desa benua). Dunia menjadi sangat transparan sehingga seolah-olah tanpa batas administrasi suatu negara. Batas-batas geografis suatu negara menjadi kabur. Globalisasi membuat dunia menjadi transparan akibat perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya sistem informasi satelit (H.Muhtarom, 2005: 44).

Arus globalisasi lambat laun semakin meningkat dan menyentuh hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Globalisasi memunculkan gaya hidup kosmopolitan yang ditandai oleh berbagai kemudahan hubungan dan terbukanya aneka ragam informasi yang memungkinkan individu dalam masyarakat mengikuti gaya hidup baru yang disenangi.

Istilah globalisasi yang dipopulerkan oleh Theodore Lavitte pada tahun 1985 ini telah menjadi slogan magis di dalam setiap topik pembahasan (Bahauddin Darrus, 1998: 161). Substansi globalisasi adalah ideologi yang menggambarkan proses interaksi yang sangat luas dalam berbagai bidang, ekonomi, politik, sosial, teknologi dan budaya.

Globalisasi menjadi kekuatan yang terus meningkat, dan dapat menimbulkan aksi dan reaksi dalam kehidupan. Globalisasi melahirkan dunia yang terbuka untuk saling berhubungan, terutama dengan ditopang teknologi informasi yang sedemikian canggih. Topangan teknologi informasi ini pada gilirannya dapat mengubah segi-segi kehidupan, baik kehidupan material maupun kehidupan spiritual.

Transendensi agama di era globalisasi dihadapkan pada ketegangan-ketegangan dialektis, antara implikasi-implikasi globalisasi dengan keharusan agama untuk tetap mempertahankan aspek transendental.

Arus globalisasi menimbulkan perubahan-perubahan dan problem-problem kontemporer yang berpengaruh terhadap kehidupan pemeluk agama. Akan tetapi

agama akan tetap eksis dan dinamis berperan dalam berbagai bidang kehidupan (Ernest Gellner, 1994: 16).

Implikasi globalisasi terhadap dimensi agama tampak dalam beberapa hal: *Pertama*, mencuatnya pola hidup materialistis yang memacu orang mengejar kekayaan materi dan melemahkan nilai spiritual dan agama. *Kedua*, konsep sekularisasi telah memberikan perubahan yang signifikan pada agama dalam masyarakat. Doktrin agama dianggap bertentangan dengan pandangan ilmiah yang memiliki banyak kelebihan dan menjadi dasar teknologi dan ekonomi modern. Sekularisasi menggeser tekanan kehidupan beragama dengan menempatkan agama hanya sebagai urusan pribadi. *Ketiga*, munculnya gerakan spiritual sebagai respon terhadap lemahnya struktur sosial dan tradisi agama yang diajarkan, ditafsirkan dan ditegakkan dalam beragam cara (Nurcholid Madjid, 1995: 54). *Keempat*, Beberapa karakter reformis cenderung mendunia, yang lain memuja ilmu pengetahuan dan cenderung menunjukkan bahwa lokasi dan manifestasi agama pada masyarakat kontemporer berubah, perubahannya dalam bentuk transformasi sosial bukan dalam bentuk kemunduran agama. *Kelima*, banyaknya konflik internal dalam tubuh umat beragama yang dipicu oleh keinginan memperoleh status sosial dan materil. Agama tidak lagi mempunyai kekuatan pemersatu pada situasi dan kondisi ideologis masyarakat kosmopolit. *Keenam*, munculnya fundamentalisme yang anonim dan tumbuh di atas tradisi, sebagai anggapan terhadap globalisasi. Komunitas fundamentalis berkeinginan kembali ke teks dasar yang harus diartikulasikan secara harfiah dan menuntut agar doktrin yang diperoleh dari teks dasar itu diterapkan pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dapat berujung pada kekerasan. Yang tentunya kontraproduktif terhadap nilai-nilai kosmopolitan (Muhtarom, 2005: 247).

Namun ada hal yang menarik di tengah perkembangan globalisasi ekonomi, teknologi, dan politik tersebut, menimbulkan fenomena nasionalisme kultural, seperti istilah yang di pakai John Naisbitt. Dikatakannya, walaupun gaya hidup kita tumbuh semakin sama, namun terhadap tanda-tanda yang tidak mungkin salah dari munculnya *countertrend* (reaksi balik) yang kuat suatu hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa seseorang dan penolakan terhadap pengaruh asing (Mohammad, 2003: 247). Fenomena tersebut muncul di beberapa negara belahan dunia, seperti:

- Singapura yang mengampanyekan Bahasa Mandarin sebagai upaya menghidupkan kembali nilai-nilai lama.
- Keprihatinan orang-orang Kanada mengenai kemungkinan penggabungan

secara kultural dengan Amerika Serikat sehingga nyaris memutuskan untuk menentang pakta perdagangan bebas AS-Kanada tahun 1988.

- Maraknya kembali pemakaian jilbab dan minat bersekolah di sekolah Islam setelah menerapkan paham sekularisme sejak 1920-an M.
- Di Indonesia tumbuhnya kegiatan-kegiatan keagamaan di pusat kampus, Hotel-hotel berbintang, kantor-kantor pemerintahan. Di samping muncul apresiasi seni budaya yang bernafas agama secara kreatif di mana-mana (Mohammad, 2003: 248)

## E. AGAMA DALAM GLOBALISASI

Dimana tempat agama ketika globalisasi menghantam Indonesia? Pertanyaan ini akan mengundang banyak jawaban yang adapat dikemukakan. Namun demikian, sekurang-kurangnya ada tiga jawaban yang dapat disampaikan dalam konteks tulisan ini.

*Pertama*, agama kan menjadi penghalang utama adanya globalisasi karena pada prinsipnya agama tidak mengajarkan adanya perubahan berlebihan. Berlebihan dalam konsumsi merupakan musuh utama agama (Islam). Paham agama demikian menempatkan agama resisten sekaligus berhadap-hadapan dengan globalisasi. Agama bermusuhan secara keras dengan fenomena berkembangnya globalisme. Hanya saja sayangnya paham agama semacam ini seringkali berhenti pada tataran praksis dan rakyat tidak menjadikan agama sebagai landasan untuk berkarya dan menentang kehadiran globalisme (Zuly Qadir, 2011: 16-17).

*Kedua*, agama akan bersifat kritis atas globalisasi sebab agama sebenarnya memiliki elan vital untuk melakukan perlawanan atas hal-hal yang dianggap kurang berpihak kepada kelompok terpinggirkan. Paham ini menyakini bahwa agama dengan kekuatan revolusioner akan mampu melakukan kritik atas perkembangan globalisme dalam dunia, termasuk di Indonesia

*Ketiga*, agama (Islam) Indonesia akan mendukung laju globalisasi karena agama yang berkembang adalah paham agama yang menempatkan bahwa globalisasi merupakan *sunnahtullah* alias tidak mungkin ditolak kehadirannya.

## F. GLOBALISASI DAN DUNIA PENDIDIKAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini di satu sisi memberikan kemudahan hidup bagi umat manusia, tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai perubahan, diantaranya pergeseran nilai. Soejatmiko menyebutkan tiga faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan yaitu, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, faktor kependudukan dan ekologi (lingkungan hidup) (Soejatmiko, 1991: 7). Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci perubahan secara struktural.

Azyumardi Azra dan Jamhari (2006: 6) berpendapat bahwa perubahan-perubahan struktural dan perkembangan yang mendorong momentum bagi globalisasi tidak ragu lagi bermula dari lapangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan segera berimplikasi ke dalam bidang politik, sosial, budaya, gaya hidup, dan lain-lain. Perubahan struktural dan perkembangan tersebut, antara lain, adalah: *Pertama*, pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan antar negara, yang pada dasarnya dikuasai perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) yang terus semakin menguat. Dengan kekuatan keuangannya, MNCs mampu melakukan riset dan pengembangan dalam produk-produk baru, sehingga dapat selalu meningkatkan daya saingnya. *Kedua*, peningkatan utang dan ketergantungan negara-negara berkembang yang sebagian besarnya merupakan negara-negara Muslim. Beban utang yang demikian berat menimbulkan kesulitan-kesulitan yang sangat parah bagi negara-negara tersebut untuk melakukan pembangunan manusia secara berkelanjutan. *Ketiga*, meningkatnya peranan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional seperti IMF, World bank, WTO, dan lain-lain dalam menentukan kebijakan program ekonomi, sosial, dan politik negara-negara berkembang. Hal ini berimplikasi terhadap kemerosotan kedaulatan negara-negara berkembang, karena harus tunduk kepada kebijakan dan keputusan lembaga internasional. *Keempat*, pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi, yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi dan nilai-nilai secara global dengan mengecilnya jarak dan waktu. Dalam hal transmisi informasi dan nilai-nilai, negara-negara berkembang berada dalam posisi tidak menguntungkan; karena hanya menjadi *receiving ends* dari penyebaran informasi nilai-nilai yang dilakukan negara maju, pemegang dominasi dan hegemoni teknologi informasi canggih. Kebanyakan negara Muslim bahkan tidak memiliki akses kepada teknologi komunikasi. *Kelima*, berakhirnya perang dingin dan bangkitnya demokrasi liberal. Bangkrutnya sistem ekonomi dan politik komunis yang diikuti dengan disintegrasi politik wilayah, membuat semakin banyak orang percaya bahwa demokrasi liberal sebagai satu-satunya alternatif yang *feasible* dan *viable* bagi keberlangsungan dan kemajuan kehidupan ekonomi dan politik (Azumardi Azzra, 2006: 10)

Kelima perubahan besar dalam lapangan ekonomi dan politik di atas menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam bidang pendidikan, baik tingkat internasional maupun nasional dan lokal. Pada tingkat internasional, terjadi reorientasi pendidikan baik tingkat kelembagaan, kurikulum, maupun manajemen sesuai dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dalam proses globalisasi.

Reorientasi itu mencakup, antara lain; pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan *knowledge-based economy*, HAM, demokratisasi dan multikulturalisme; kelembagaan yang lebih otonom melalui privatisasi dan penyertaan dunia industri dan masyarakat luas; dan manajemen yang mengarah kepada sistem, proses, nilai, dan budaya "*corporate good governance*".

Pada tingkat nasional, respon dunia pendidikan terhadap globalisasi telah menjadi wacana sejak awal 1990-an, dan menemukan momentum melalui perumusan "paradigma baru" pendidikan nasional selaras dengan reformasi nasional dengan jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada Mei 1998.

Dalam rumusan "Arah Pandangan Dasar Pendidikan Nasional" yang tercakup dalam paradigma baru pendidikan Nasional itu dikemukakan 10 kerangka acuan, antara lain: pendidikan dengan prinsip global. Pendidikan harus mampu berperan dan menyiapkan peserta didik dalam konstalasi masyarakat global. Dalam pendidikan berwawasan global pada waktu yang sama pendidikan memiliki kewajiban untuk melestarikan karakter nasional. Meski konsep *nation state* sudah diragukan dan bahkan *global state* yang tidak lagi mengenal tapal batas, karena kemajuan teknologi informasi, pembinaan karakter nasional tetap relevan dan bahkan harus dilakukan (Azumardi Azzra, 2006: 11).

Selanjutnya paradigma baru pendidikan nasional menggariskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam arah baru pengembangan pendidikan nasional, yaitu: 1) kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain; 2) pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial; 3) pendidikan dalam rangka pemberdayaan bangsa; 4) pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan nasional; 5) pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan; 6) penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan; 7) perencanaan terpadu secara horizontal dan vertikal; 8) pendidikan berorientasi peserta didik; 9) pendidikan multikultural; 10) pendidikan dengan perspektif global.

## G. RESPON PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP GLOBALISASI

Globalisasi sebenarnya bukan fenomena baru sama sekali bagi masyarakat Muslim Indonesia. Pembentukan dan perkembangan masyarakat muslim Indonesia bahkan berbarengan dengan datangnya berbagai gelombang global secara konstans dari waktu ke waktu. Sumber globalisasi itu adalah Timur Tengah, khususnya mula-mula Mekkah, dan Madinah, dan sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga Kairo. Karena itu sudah bisa diduga, globalisasi ini lebih bersifat religio-intelektual, meski dalam kurun tertentu juga diwarnai oleh semangat religio-politik (Azzumardi Azzra, 1999: 43).

Tetapi globalisasi yang berlangsung dan melanda masyarakat Muslim Indonesia sekarang ini menampilkan sumber dan watak yang berbeda. Proses globalisasi dewasa ini, tidak lagi bersumber dari Timur Tengah, melainkan dari barat, yang terus memegang supremasi dan hegemoni dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dunia umumnya.

Tantangan global dan globalisasi yang terus menemukan momentumnya sejak akhir millenium lalu, jauh lebih kompleks daripada tantangan-tantangan yang pernah dihadapi lembaga pendidikan Islam di masa silam. Kompleksitas tantangan itu menjadi lebih rumit lagi, ketika kita harus mengakui, bahwa secara internal lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya masih menghadapi berbagai permasalahan yang masih belum terselesaikan sampai sekarang.

Tantangan-tantangan dan masalah internal pendidikan Islam pascamodernisasi dan tantangan globalisasi pada hari ini dan masa depan adalah sebagai berikut: *Pertama*, jenis pendidikan yang dipilih dan dilaksanakan. Dengan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dan politik pendidikan sejak tahun 1970-an, dan peluang-peluang baru seperti diisyaratkan dalam paradigma baru pendidikan nasional, kini lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki peluang dan sekaligus tantangan berkenaan dengan jenis pendidikan yang dapat dipilih dan diselenggarakan, yang setidaknya kini menyediakan empat pilihan; 1) pendidikan yang berpusat pada *tafaquh fi al-din*, seperti yang ada dalam tradisi pesantren pada masa modernisasi (pesantren salafiyah), dengan kurikulum yang hampir seluruhnya ilmu agama (Azzumardi Azzra, 1999: 49). 2) pendidikan madrasah yang mengikuti kurikulum Diknas dan Depag, sebagaimana dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa Madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama. 3) sekolah Islam "plus" atau unggulan yang mengikuti kurikulum Diknas, yang pada dasarnya adalah pendidikan umum plus agama. 4) pendidikan ketrampilan (vocation

training) mengikuti model STM. *Kedua*, berkaitan dengan masalah pertama diatas adalah persoalan identitas diri lembaga pendidikan Islam tertentu. Pada satu segi, pengakuan atas penyetaraan pendidikan terhadap lembaga pendidikan Islam telah membuka berbagai peluang bagi penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan Islam. Tetapi pengambilan pilihan-pilihan di atas sangat bisa jadi dapat mengorbankan identitas pendidikan Islam sendiri sebagaimana telah terpatri dalam masyarakat. *Ketiga*, penguatan lembaga dan manajemen. Perubahan-perubahan kebijakan pendidikan nasional misalnya, yang menekankan pada peran lembaga pendidikan Islam sebagai pendidikan berbasis masyarakat, dan tantangan-tantangan global mengharuskan lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat dan memperdayakan kelembagaannya.

## H. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI

Menurut Abdul Rachman Assegaf (2004) ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun format pendidikan Islam, yaitu: masalah dikotomi ilmu dan pola pikir teo-sentris yang tidak seimbang. Dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam telah berjalan cukup lama, dan berawal ketika terjadi pemisahan antara ilmu-ilmu agama (*religious sciences*) dengan ilmu-ilmu umum (*rational*). Terlebih setelah munculnya pemahaman sebagian ulama yang mengartikan menuntut ilmu agama tergolong *fardlu ain*, sementara menuntut ilmu dalam kategori non-agama termasuk *fardlu kifayah*, berimplikasi sebagian besar umat ini berbondong-bondong mempelajari ilmu agama seraya mengalihkan perhatiannya pada ilmu-ilmu umum yang dianggapnya tidak wajib dipelajari. Padahal, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sendiri tidak dijelaskan pemisahan bentuk kewajiban tersebut. ilmu itu utuh, satu kesatuan, tidak perlu dipisah-pisahkan. Sedemikian jauhnya akibat pemisahan ilmu tersebut, sehingga timbul anggapan bahwa ilmu-ilmu non-agama tidak terkait dengan kesalehan, ketaqwaan, ibadah, surga, pahala, dan lain sebagainya. Apa akibatnya? Saat ini umat Islam jauh tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, dan percaturan global.

Format ulang terhadap pendidikan Islam yang kontekstual terhadap arus global pada intinya adalah menghilangkan batas pendidikan Islam yang dikotomik menuju pendidikan yang integralistik. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Mengharmonisasikan kembali ayat-ayat ilahiyah (ketuhanan) dengan ayat-ayat kauniyah (alam semesta), sebab alam merupakan ayat-ayat dan manifestasi sifat-sifat Tuhan. Ayat-ayat ilahiyah dipelajari dalam

religious sciences sebagaimana telah berjalan selama ini, akan tetapi tidak boleh dipisahkan dengan ayat-ayat kauniyah sebagaimana terungkap dalam ilmu-ilmu modern.

2. Mengharmonisasikan kembali relasi Tuhan-manusia dalam bentuk pendidikan yang *teo-antropo-sentris* dengan titik tekan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, terlahir dalam keadaan fitrah, dan selain manusia berfungsi sebagai hamba Allah juga bertugas sebagai *khalifah fi al-ardi*.
3. Mengharmonisasikan antara iman dengan ilmu. Iman seseorang hendaknya didasari oleh ilmu, sehingga keyakinannya tidaklah atas dasar taqlid, melainkan penuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam melalui proses belajar.
4. Mengharmonisasikan antara pemenuhan kebutuhan rohani (spiritual ukhrawi) dengan jasmani (material-duniawi). Pendidikan Islam hendaknya tidak dimaksudkan untuk mengisi mental-spiritual anak dengan pembinaan rohani semata, melainkan juga penguatan unsur jasmaniah sehingga tercapai kebahagiaan utuh jasmani-rohani dan dunia-akhirat (Abdul Rahman, 2004: 18-20).

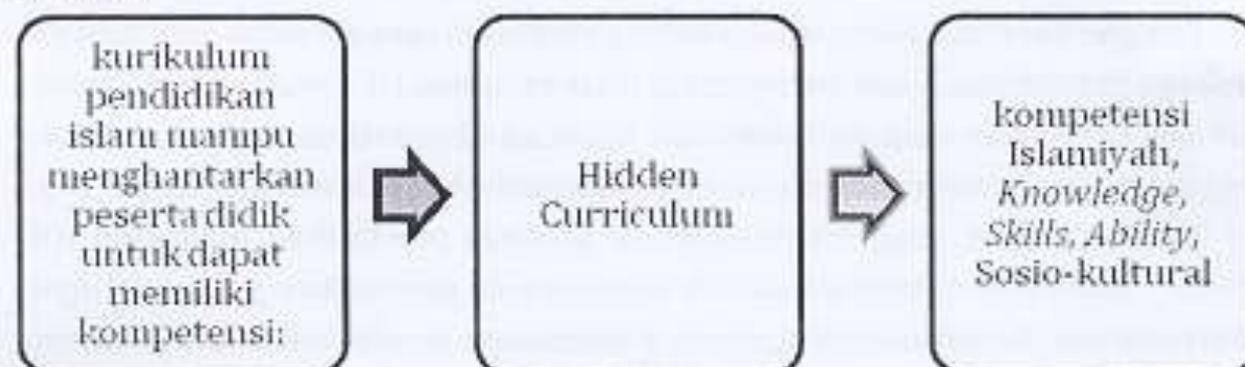
## I. KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI

Materi pendidikan dan pendidikan Islam tergambar dalam kurikulum yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikannya. Desain materi pendidikan harus memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, serta sesuai dengan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Dewasa ini masyarakat dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan yang menunjukkan percepatan secara drastis dan akan menjadi indikator tantangan pembaharuan dan pengembangan kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Paradigma pendidikan lama di mana ilmu pengetahuan terpusat pada lembaga pendidikan formal konvensional. Dengan program kurikulum yang muatannya terlalu berat, berorientasi pada produk belajar dan bukannya pada proses belajar, sangat didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual, dan eskatologis, akan mulai tergeser dengan paradigma pendidikan baru.

Paradigma baru pendidikan islam berupaya melakukan pembaharuan dengan tidak hanya diorientasikan pada aspek korespondensi-tekstual dengan menekankan aspek “hafalan” teks-teks atau buku-buku keagamaan yang sudah ada, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan dasar untuk belajar mandiri, bereksplorasi, kemampuan analisis, kemampuan mencari dan memecahkan problem dari teks-teks keagamaan, serta kemampuan memperbaharui teks-teks keagamaan untuk disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman, yaitu tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam.

Desain kurikulum pendidikan Islam diharapkan dapat menguasai: *pertama*, seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan wawasan, serta penerapannya untuk memenuhi kualitas sesuai dengan kriteria atau tujuan pembelajaran; *kedua*, penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya, dan cara berkehidupan di masyarakat sesuai profesinya; *ketiga*, didasarkan pada pengembangan kemampuan dan kepribadian yang optimal. Dengan demikian program kurikulum pendidikan Islam diharapkan mampu menghantarkan peserta didik untuk dapat memiliki lima kompetensi dasar, yaitu (1) kompetensi islamiyah, (2) *knowledge* (pengetahuan), (3) *skill* (ketrampilan), (4) *ability*, dan (5) potensi sosio-kultural. Kelima kompetensi tersebut dapat digambarkan dan dideskripsikan, sebagai berikut:



## J. FORMAT MANAJEMEN (PENGELOLAAN) PENDIDIKAN ISLAM (MADRASAH)

Madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi, antara lain pola pembinaannya harus mengikuti pola pembinaan yang mengacu kepada sekolah-sekolah pemerintah, madrasah mengikuti kurikulum nasional, ikut serta dalam UAN dan berbagai peraturan yang diatur oleh Depdikbud (sekarang Kemendikbud) (Abdul Rachman, 2004: 61).

Sebagai bagian dari sistem pendidikan madrasah dituntut untuk menggunakan kurikulum, menggunakan buku paket dan menetapkan sistem ujian yang sama, madrasah juga terbebani dengan menampung anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial, anak-anak pedesaan, keluarga petani (sebagian besar putri). Dengan keterbatasan yang dimilikinya madrasah telah menjawab komitmen pemerintah dalam gerakan pendidikan untuk semua (*education fo all*).

Kemunculan madrasah sendiri merupakan realisasi upaya pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada, sehingga eksistensinya dalam dunia pendidikan nasional harus benar-benar diperhatikan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali secara cermat berbagai permasalahan yang membelit madrasah selama ini, sebagai upaya untuk memajukan dan menumbuhkan kemandirian madrasah.

Diantara permasalahan yang dihadapi madrasah pada umumnya antara lain:

1. Ketidakjelasan struktur dan tata kerja
2. Ketidakjelasan visi, misi, dan tujuan
3. Lemahnya manajemen
4. Kurangnya keterlibatan masyarakat
5. Lemahnya jejaring (*networking*) (H. Fatah, 2011: 199-200).

Dengan demikian harus diakui bahwa madrasah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan islam mempunyai nilai-nilai positif disamping tentunya berbagai kelemahan yang perlu dibenahi. Salah satu kelemahan madrasah adalah rendahnya manajemen yang masih perlu dibenahi (Abdul Rachman, 2004: 74).

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan madrasah itu sendiri. Salah satu faktornya adalah perencanaan pendidikan yang nantinya akan membentuk suatu sistem tertentu. Perencanaan pendidikan memiliki posisi yang cukup strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan akan dapat memberikan kejelasan arah usaha dalam proses pendidikan, sehingga usaha pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan terletak pada kualitas perencanaan pendidikan yang menyeluruh.

Salah satu kebijakan pemerintah yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan diterapkannya Manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/MBM). Secara teroris MBS/MBM memberi peluang bagi pengelola pendidikan di sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs) untuk mendesain, merancang suatu program dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Potensi ini dapat berupa SDMnya, fasilitas, dan dana.

Diterapkannya MBS/MBM sebagai Manajemen berbasis sekolah/madrasah strategik, dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.

## K. IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH STRATEGIK UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), menurut konsep Tim Teknis BAPPENAS, merupakan bentuk alternatif sekolah/madrasah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Yoyon Bahtiar, 2011: 158). Tujuan utama MBS/MBM adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumberdaya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi (Udin Syaefudin, 2007: 37).

Sedangkan manajemen berbasis sekolah strategik diartikan sebagai ilmu dan kiat tentang perumusan (*formulating*), pelaksanaan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategik antar fungsi-fungsi MBS/MBM yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuan masa depan secara efektif dan efisien (Akdon, 2009: 231).

Manajemen madrasah yang sementara ini berpola *lillahi ta'ala* harus diubah dengan pola manajemen yang modern yang mempunyai *prinsip: planning, organizing, controlling* dan *evaluating*. Sehingga keprofesionalan para pengelola madrasah dibutuhkan supaya madrasah tetap survive. Sebab rasa tanggungjawab yang tinggi tidak diimbangi dengan *manajerial skill* yang memadai, akan menjadi *treatment* manajemen bersifat uji coba (Akdon, 2009: 208).

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, madrasah harus mampu menghadapi berbagai masalah baik dalam proses pengelolaan maupun peningkatan mutu. Masih banyaknya pengelolaan atau manajemennya berpola *lillahi ta'ala*. Pada isu MBM beberapa permasalahan yang dipandang mendesak untuk diatasi madrasah adalah masalah pengelolaan atau manajemen. Dengan manajemen yang baik, maka berbagai persoalan lainnya akan dapat diselesaikan dengan mudah.

Di antara permasalahan yang sangat krusial adalah mulai mengaburnya visi, misi dan tujuan madrasah, kurangnya pengelolaan/manajemen madrasah yang berarti juga para pengelola madrasah itu kurang profesional dalam mengelola dan yang terakhir kurangnya hubungan antara pengelola madrasah

dengan masyarakat sekitarnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian madrasah lahir dari adanya kebutuhan masyarakat sekitar.

Menurut Dr. H. Fatah Syukur dalam bukunya manajemen pendidikan berbasis pada madrasah pengelolaan madrasah yang efektif harus memenuhi beberapa cara diantaranya:

1. Memantapkan visi, misi dan tujuan, karena dengan pemantapan visi, misi, dan tujuan madrasah akan mengetahui kemana arah pendidikan yang akan dilaksanakannya sehingga tidak kabur.
2. Kepemimpinan madrasah yang profesional, artinya pemimpin madrasah harus mempunyai manajerial skill dan rasa tanggung jawab sehingga kepemimpinannya akan membuahkan hasil yang maksimal.
3. Hubungan masyarakat dan madrasah harus diperbaiki karena partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan. Hal ini akan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap madrasah menjadi tinggi, sehingga hal itu dapat dibuktikan dengan memberikan beberapa kontribusi baik dalam bentuk material, kontrol manajemen, pembinaan serta bentuk partisipasi lain dalam rangka meningkatkan eksistensi madrasah yang selanjutnya menjadi kebanggaan lingkungan setempat.

## L. KESIMPULAN

Globalisasi merupakan peluang sekaligus ancaman untuk pendidikan Islam. Sebagai peluang, satu sisi akan memudahkan pendidikan Islam untuk mengakses berbagai informasi dengan mudah. Juga memudahkan pendidikan Islam untuk menyebarkan produk-produk keilmuan yang memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. sebagai ancaman, ternyata globalisasi tidak hanya mempengaruhi tatanan kehidupan pada tataran makro, namun juga mengubah tata kehidupan mikro, misalnya terhadap ikatan-ikatan kehidupan sosial masyarakat, hilangnya nilai-nilai tradisi, lunturnya adat-istiadat, sopan santun, dan penyimpangan sosial dalam berbagai modus operasinya.

Langsung atau pun tidak langsung dampak globalisasi berpengaruh terhadap idealitas pendidikan Islam, yaitu adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sains* produk pendidikan Islam, sehingga konsep, kurikulum, dan manajemen pendidikan Islam harus di perbaharui, agar tidak ketinggalan zaman dan selaras dengan perkembangan zaman.

Konsep pendidikan yang perlu diperbaharui adalah mengubah pandangan dikotomi ilmu dalam Islam dengan mengharmonisasikan kembali ayat-ayat

ilahiyyah dengan ayat kauniyyah, relasi Tuhan-manusia dalam bentuk pendidikan yang *teo-antrpo-sentris*, mengharmonisasikan iman dengan ilmu, serta mengharmonisasikan pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani.

Pada dataran kurikulum juga mengalami perubahan dari kurikulum berbasis materi kepada kurikulum berbasis kompetensi yang akan menghasilkan 5 kompetensi yaitu, kompetensi islamiyah, kompetensi *knowledge*, kompetensi *ability*, kompetensi *skills*, dan kompetensi sosio-kultural.

Untuk manajemen (pengelolaan) madrasah dari manajemen lillahi ta'ala (konvensional) menuju manajemen modern yang mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Selain itu juga perlu meninjau ulang visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Islam tingkat satuan pendidikan, serta dengan mendekatkan kembali relasi madrasah dan masyarakat (*stakeholder* madrasah)

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Tafsir, dkk. 2004. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka. Cet. Ke-1
- Abdul Rachman Assegaf, dkk. 2004. *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi: Buah Pikiran Seputar Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. ke-1
- Achmadi. 2005. *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. ke-1
- Ahmad, Nunu, dkk. 2010. *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Ahmad, Nunu, dkk. 2010. *Spktrum Baru Pendidikan Madrasah*. Jakarta: Pulitbang Agama dan Keagamaan Kemenag RI.
- Akdon. 2009. *Strategic Management For Educational Management; Manajemen Strategi untuk Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Cet. Ke-3
- Arifin, HM. 2003. *Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara. Edisi revisi.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Burhanuddin, Jajat dan Dina Afriany (ed.). 2006. *Mencetak Muslim Modern; Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fadjar, Malik. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Feisal, Amir Jusuf. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani. Cet. Ke-1
- Gellner, Ernest. 1994. *Menolak Posmodernisme*. Bandung: Penerbit Mizan.
- H. Muhtarom H.M., 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi; Resistensi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet, ke-1
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2003. *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Lantabora Press. Cet, ke-4
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan; Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Machali, Imam, dkk. 2004. *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Madjid, Nurcholid. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Mas'ud, Abdurrahman, dkk. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. Cet. Ke-1.
- Nata, Abuddin. 2010. *Sejarah Pendidikan Islam; pada periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-2
- Qodir, Zuly. 2011. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said Aqiel Siradj, dkk. 1999. *Pesantren Masa Depan; Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Saleh, Abdul Rachman. 2004. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanaky, Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press. Cet. Ke-1
- Soejatmiko. 1991. *Manusia dan Dunia yang sedang Berubah*. Jakarta: Grafindo.
- Su'ud, Udin Syaefudin, dan Abin Syamsuddin Makmun. 2007. *Perencanaan Pendidikan; Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Cet. Ke-3
- Syahrin Harahap (ed.). 1998. *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syukur, H. Fatah NC. 2011. *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Yunus, Mahmud. 1957. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.